

## Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan

Jelly Maria Lembong\*, Harol Reflie Lumapow, Viktory Nicodemus Joufree Rotty

Manajemen Pendidikan - Universitas Negeri Manado, Tomohon, Indonesia

\*Corresponding Author: jelilembong@gmail.com

### Abstract

*In educational transformation, the Merdeka Learning policy is an initiative that aims to change the paradigm of traditional education into education that is more independent, innovative, and relevant. The purpose of this research is to examine the implementation of Freedom of Learning as a transformation of education policy. This study uses a type of qualitative research study of literature. The implementation of the Freedom to Learn policy in Indonesia requires effective strategies such as improving the quality of human resources, implementing zoning, simplifying the RPP format, eliminating national exams, implementing USBN by schools, and disseminating comprehensive policies. Challenges include adaptation during a pandemic, inadequate educational infrastructure, limited understanding, and improving the quality of learning and human resources. Nonetheless, this policy has had a positive impact in improving the quality of learning, developing student competence and character, reducing the administrative burden on teachers, and increasing student involvement and motivation. With good cooperation, it is hoped that the Merdeka Learning policy will continue to improve the education system and encourage the growth of quality young people.*

**Keywords:** *freedom of learning; education transformation; education policy*

### Abstrak

Dalam transformasi pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan tradisional menjadi pendidikan yang lebih mandiri, inovatif, dan relevan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji tentang implementasi Merdeka Belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi literatur. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia membutuhkan strategi efektif seperti peningkatan kualitas SDM, penerapan zonasi, penyederhanaan format RPP, penghapusan UN, penerapan USBN oleh sekolah, serta diseminasi kebijakan yang komprehensif. Tantangan meliputi adaptasi selama pandemi, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, pemahaman yang terbatas, dan perbaikan kualitas pembelajaran dan SDM. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi dan karakter siswa, mengurangi beban administratif guru, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kebijakan Merdeka Belajar terus memperbaiki sistem pendidikan dan mendorong pertumbuhan generasi muda berkualitas.

**Kata Kunci:** merdeka belajar; transformasi pendidikan; kebijakan pendidikan

### Article History:

Received 2023-02-13

Revised 2023-05-18

Accepted 2023-06-01

### DOI:

10.31949/educatio.v9i2.4620

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen penting dalam mempersiapkan generasi masa depan menghadapi perubahan yang terjadi dengan cepat. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman untuk memastikan siswa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Transformasi kebijakan pendidikan menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini, dengan fokus pada mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inovatif, merangsang kreativitas dan kolaborasi, serta memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Dalam upaya

mencapai tujuan tersebut, implementasi kebijakan pendidikan yang efektif dan menyeluruh sangat penting agar pendidikan dapat menyediakan lingkungan yang mendukung siswa dalam menghadapi tuntutan dunia modern (Baro'ah, 2020).

Transformasi kebijakan pendidikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengubah dan menyelaraskan kebijakan-kebijakan pendidikan dengan tujuan mencapai perubahan positif dalam sistem pendidikan perlu untuk dilakukan (Aziz et al., 2022). Transformasi ini dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Merentek et al, 2023) Transformasi kebijakan pendidikan melibatkan perubahan dalam paradigma pembelajaran, kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, penilaian, dan pengelolaan sistem pendidikan (Mansyur, 2020). Tujuan dari transformasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif, inklusif, relevan, dan mendorong pengembangan potensi maksimal siswa. Transformasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan menyeluruh dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

Salah satu transformasi kebijakan pendidikan yang signifikan di Indonesia adalah pengenalan kebijakan merdeka belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud RI). Kebijakan merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang memberikan kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan. Pendekatan ini mengakomodasi berbagai faktor seperti kearifan lokal, budaya, sosio-ekonomi, dan infrastruktur yang mempengaruhi proses pembelajaran (Ainia, 2020). Program merdeka belajar dijabarkan melalui empat kebijakan, yaitu: (1) sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB) yang bertujuan untuk memastikan akses yang lebih adil dan merata ke sekolah, (2) penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk memudahkan guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang relevan dan efektif, (3) penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan lokal, dan (4) penghapusan Ujian Nasional (UN) yang mengarah pada penilaian holistik dan berkelanjutan terhadap kemampuan siswa (Anjelina et al., 2021). Kebijakan merdeka belajar ini bertujuan untuk mendorong partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan inklusif.

Untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dengan efektif, diperlukan dasar filosofis yang kuat dan analisis yang mendalam. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kebijakan ini, karena ia meyakini bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan menciptakan individu yang mandiri, baik secara fisik maupun mental (Ainia, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, membebaskan mereka dari beban birokrasi yang berlebihan, dan memungkinkan para guru untuk fokus pada pengajaran yang berkualitas, sementara siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat mereka (Widyastuti, 2022). Dengan demikian, implementasi kebijakan ini mencerminkan semangat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pemberdayaan individu dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu studi menemukan bahwa diseminasi kebijakan perlu dimaksimalkan, karena banyak pendidik dan siswa tidak menyadari sifatnya (Nasrulhaq et al., 2022). Studi lain merekomendasikan bahwa kebijakan tersebut harus fokus pada penyediaan tenaga pendidik berkualitas untuk memastikan pembelajaran berkualitas dalam menunjang pendidikan (Ahmad et al., 2022). Sebuah studi tentang implementasi kebijakan dalam pendidikan Islam menemukan bahwa kebijakan tersebut dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan memperdalam pengetahuan mereka tentang pendidikan Islam (Hamdani & Zulfaqor, 2022). Singkatnya, kebijakan Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Untuk menerapkan kebijakan secara efektif, diperlukan landasan filosofis dan analisis. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, dan rekomendasi telah dibuat untuk meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, penting dalam mengkaji implementasi Merdeka Belajar sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pendahuluan minimal harus mengandung state of the art (kajian review literatur singkat), gap analysis, permasalahan dan/atau hipotesis (jika ada), solusi, dan tujuan penelitian. Pada bagian ini, uraian harus bersifat narasi tanpa dipisah menjadi beberapa sub judul baru. Seluruh paparan di dalam bagian ini ditulis dalam bentuk esai, sehingga tidak ada format numerik atau abjad yang memisahkan antara bab/bagian, atau untuk menandai bab/bagian baru. Untuk itu, jika ada bagian dari isi artikel yang memerlukan penomoran (numbering) maupun bullet list, maka buat menjadi paragraf mengalir seperti berikut: (1) satu, (2) dua dan (3) tiga. Jumlah halaman pada bagian ini maksimal 20% dari keseluruhan halaman naskah). Bagian ini berisi tentang perkembangan terbaru bidang ilmu yang diteliti, penjelasan tentang kesenjangan (das sein vs das sollen), argumentasi peneliti dan tujuan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data sebagai form deskripsi atau teks naratif, dan bukan sebagai form dengan nilai angka seperti pada penelitian kuantitatif. Metode kualitatif bertujuan dalam memberikan deskripsi dan penggambaran terhadap fenomena yang ada, baik yang mempunyai karakteristik rekayasa manusia ataupun alamiah (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini menitikberatkan pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan yang terjadi. Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi Merdeka Belajar sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan informasi dengan metode mengumpulkan dokumen dan literatur sebagai sumber informasi. Dalam upaya pengumpulan informasi, dilakukan studi literatur dengan mencari sumber-sumber tertulis seperti majalah, arsip, buku, dokumen, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan implementasi Merdeka Belajar sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan menggali literatur yang relevan, penelitian studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam, mengevaluasi penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian berikutnya (Anggito & Setiawan, 2018). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh. Tahapan analisis data mencakup display data, reduksi data, dan verifikasi serta kesimpulan. Data yang sudah dianalisis kemudian diinterpretasikan dan dijelaskan secara deskriptif dalam pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Konsep Merdeka Belajar**

Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan inovatif yang diterapkan di Indonesia saat ini. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah dalam mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam konsep Merdeka Belajar, pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan kearifan lokal, budaya, situasi sosio-ekonomi, serta infrastruktur yang ada pembelajaran (Ainia, 2020). Dengan demikian, Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan karakteristik setiap daerah atau komunitas pendidikan. Pada pelaksanaannya program ini terdiri dari empat kebijakan utama yang dirancang untuk mengubah dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada.

Pertama, penghapusan Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu kebijakan utama dalam program Merdeka Belajar (Tohir, 2019). Dalam implementasi program Merdeka Belajar, salah satu kebijakan utama yang diambil adalah penghapusan Ujian Nasional (UN). Keputusan ini didasarkan pada tujuan untuk mengurangi tekanan dan beban yang dirasakan oleh siswa, serta menggeser fokus pendidikan ke arah proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk menggantikan UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, mengenalkan Asesmen Nasional (AN) sebagai bentuk evaluasi yang lebih komprehensif. Asesmen Nasional melibatkan tiga aspek penilaian yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM merupakan program pemerintah untuk mengevaluasi

kualitas pendidikan di setiap lembaga formal setara SD, SMP, dan SMA. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kualitas hasil belajar peserta didik dalam aspek penalaran, literasi (keterampilan membaca dan menulis), numerasi (keterampilan matematika), serta pembentukan karakter dan lingkungan belajar.

Menurut Matondang et al. (2022) menuturkan bahwa asesmen dalam AN tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga mencakup kemampuan, pemahaman, sikap, dan motivasi siswa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa dan memetakan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, AN tidak hanya mengevaluasi pencapaian individu, tetapi juga memberikan gambaran tentang mutu pendidikan secara umum. Melalui penggunaan AN, pemerintah berharap dapat mengukur kemampuan siswa secara lebih holistik dan mendorong penguatan pendidikan karakter. Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai aspek-aspek non-akademik yang memengaruhi proses pembelajaran, seperti nilai-nilai moral, kepribadian, dan kondisi lingkungan di sekolah.

Kedua, kebijakan ini juga mencakup penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah (Tohir, 2019). USBN dirancang untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih akurat dengan memperhatikan konteks lokal dan keunikan setiap sekolah. Dengan memberikan kewenangan kepada sekolah dalam melaksanakan USBN, diharapkan penilaian lebih dapat memperhitungkan kemampuan siswa secara komprehensif, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Selain itu, penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga menjadi fokus dalam program Merdeka Belajar (Tohir, 2019). RPP yang lebih sederhana dan fleksibel bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam merencanakan pembelajaran yang bermutu. Diharapkan dengan RPP yang lebih mudah disusun, guru dapat lebih fokus pada konten pembelajaran dan strategi pengajaran yang efektif, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Menurut Sibagariang et al. (2021) bahwa upaya untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sehingga kebijakan penyederhanaan format RPP telah diterapkan. Dalam kebijakan ini, guru diberikan kebebasan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, RPP yang disusun harus memuat setidaknya tiga komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dengan adanya kebebasan ini, diharapkan guru dan siswa memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat menjadi lebih aktif. Selain itu, penyederhanaan format RPP ini juga bertujuan untuk menghindari kekakuan dalam pembelajaran di sekolah, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi metode dan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.

Terakhir, program Merdeka Belajar mencakup implementasi sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PSB) (Tohir, 2019). Tujuan dari sistem zonasi PSB adalah untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah yang berkualitas dengan sekolah yang kurang berkualitas. Melalui pengaturan zona geografis, diharapkan distribusi siswa antara sekolah-sekolah dapat lebih merata sehingga semua anak memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.

Menurut Daga (2021) bahwa dalam kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, tujuan dari zonasi adalah untuk menghapuskan sistem penerimaan siswa yang eksklusif dan diskriminatif. Dengan menerapkan zonasi, semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah-sekolah yang berkualitas tanpa adanya pembatasan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Selain itu, zonasi juga bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah siswa di setiap sekolah, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara sekolah-sekolah yang memiliki kualitas yang berbeda. Selama masa pandemi, kebijakan zonasi juga dapat membantu meningkatkan kreativitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, karena siswa yang berada dalam wilayah zonasi yang sama cenderung memiliki situasi dan kondisi yang serupa. Selanjutnya, zonasi juga membantu dalam melakukan analisis kebutuhan guru dan pendistribusian mereka secara lebih efektif, karena dapat mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah dalam hal jumlah guru yang diperlukan. Terakhir, dengan menerapkan zonasi, diharapkan lingkungan sekolah dapat lebih dekat dengan lingkungan keluarga siswa, sehingga dapat

memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka dan menciptakan sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung proses pembelajaran.

## 2. Strategi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar memerlukan strategi yang efektif untuk memastikan tujuan dan prinsip kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan baik. Strategi-strategi ini melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan yang matang, pengembangan kurikulum yang responsif, peningkatan kompetensi guru, serta pemberdayaan lembaga pendidikan. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan kebijakan Merdeka Belajar dapat berhasil menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Menurut penelitian Rahayu et al. (2022) dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar, strategi yang diadopsi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah melalui program pelatihan dan pembinaan yang ditujukan kepada guru dan kepala sekolah. Pelatihan dan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pedagogis para guru, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, program ini juga melibatkan kepala sekolah untuk memperkuat kepemimpinan yang efektif dalam mengelola sekolah dan memfasilitasi pengembangan profesionalisme guru. Pelatihan dan pembinaan ini mencakup berbagai aspek, seperti penguasaan materi pembelajaran, penerapan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta peningkatan kemampuan dalam mendesain dan mengevaluasi kurikulum. Dengan adanya strategi ini, diharapkan kualitas SDM di sekolah akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selanjutnya, Mauizdati (2020) juga merumuskan strategi kebijakan Merdeka Belajar yaitu penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan siswa baru. Strategi penting tersebut dipandang penting dalam rangka mengurangi kesenjangan yang ada antara sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dengan sekolah yang memiliki kualitas yang rendah. Dalam sistem zonasi ini, wilayah geografis dibagi menjadi zona-zona tertentu, dan siswa diberikan prioritas untuk masuk ke sekolah-sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Tujuan dari penerapan sistem zonasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki sekolah yang berkualitas dan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan kesenjangan yang ada antara sekolah-sekolah di berbagai wilayah dapat dikurangi, sehingga setiap siswa memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas.

Jahra Astini (2022) juga merumuskan strategi kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut terdapat dua langkah yang diambil, yaitu penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan penghapusan Ujian Nasional (UN). Penyederhanaan format RPP bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif. Dengan membebaskan guru dari format yang kaku, mereka dapat mengadaptasi metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Di sisi lain, penghapusan UN juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan menghilangkan tekanan dan beban yang biasanya dialami oleh siswa dalam menghadapi ujian yang menentukan, perhatian dapat difokuskan pada proses pembelajaran yang sebenarnya. Guru memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami materi dan menerapkan metode pengajaran yang lebih inovatif, sedangkan siswa dapat lebih fokus pada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan. Melalui kombinasi penyederhanaan format RPP dan penghapusan UN, diharapkan kualitas pembelajaran dapat meningkat secara signifikan, dengan memberikan ruang bagi pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi pada siswa dan memperkuat pemahaman serta keterampilan mereka dalam mencapai hasil pembelajaran yang optimal.

Sherly et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa upaya untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar, strategi implementasi yang digunakan adalah dengan menerapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan

siswa secara lebih akurat. Dalam strategi ini, sekolah memiliki kewenangan dalam melaksanakan USBN sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa di lingkungan mereka. Dengan demikian, penilaian terhadap kemampuan siswa dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi lokal. USBN yang dilakukan oleh sekolah juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka dengan lebih baik. Strategi ini juga memberikan ruang bagi sekolah dalam merancang pendekatan penilaian yang lebih kontekstual dan mengakomodasi keberagaman siswa. Dengan adanya penerapan USBN yang diserahkan kepada sekolah, diharapkan proses evaluasi kemampuan siswa dapat lebih akurat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada penelitian Simanjuntak et al. (2023) bahwa dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar secara efektif, strategi implementasi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan tata kelola keuangan dan administratif dalam menjalankan program tersebut. Dalam konteks ini, peningkatan tata kelola keuangan bertujuan untuk memastikan alokasi dana pendidikan yang transparan, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini melibatkan perencanaan anggaran yang cermat, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana, dan pelaporan yang transparan. Sementara itu, peningkatan tata kelola administratif berkaitan dengan pembenahan proses dan sistem administrasi pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan data siswa, pengelolaan kepegawaian, serta prosedur pengadaan dan distribusi sumber daya pendidikan (Merentek et al, 2023). Dengan meningkatkan tata kelola keuangan dan administratif, diharapkan program Merdeka Belajar dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar di berbagai lembaga pendidikan, penting untuk melakukan diseminasi kebijakan secara komprehensif kepada seluruh pihak terutama dosen dan guru. Diseminasi yang efektif bertujuan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan tersebut dan untuk memaksimalkan pelaksanaannya di tingkat institusi (Nasrullohaq et al., 2022). Diseminasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti menyelenggarakan pertemuan atau workshop khusus yang melibatkan dosen dan guru, menyediakan materi panduan yang jelas dan mudah dipahami, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti surat elektronik, portal institusi, dan media sosial. Dalam diseminasi, penting untuk menyoroti tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Informasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan. Dengan melakukan diseminasi kebijakan secara menyeluruh, diharapkan para dosen dan guru dapat memahami dengan baik tujuan dan prinsip kebijakan Merdeka Belajar, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menerapkan kebijakan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Dosen dan guru yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan ini akan dapat mengadaptasi metode pembelajaran yang inovatif, memberikan kebebasan dan kemandirian kepada peserta didik, serta mendorong perkembangan potensi individu. Diseminasi kebijakan yang efektif juga dapat menciptakan kesadaran kolektif dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar, sehingga mencapai transformasi yang lebih baik dalam sistem pendidikan di Indonesia.

### 3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Tantangan dan hambatan kebijakan Merdeka Belajar dapat meliputi beberapa aspek. Tantangan dan hambatan kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia dapat terjadi mengingat kompleksitas sistem pendidikan yang ada. Implementasi kebijakan ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia, terdapat tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang memaksa dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Menurut Pinatih (2021) menuturkan bahwa pandemi ini telah mengubah tata cara pembelajaran tradisional yang mengandalkan interaksi langsung antara guru dan siswa di dalam kelas. Implementasi Merdeka Belajar pada masa pandemi ini memerlukan adaptasi yang cepat dan efektif dari guru dan siswa untuk menjalankan pembelajaran secara daring atau melalui platform pembelajaran online. Tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah, penyesuaian

metode pembelajaran yang efektif dalam lingkungan virtual, dan tantangan psikologis yang timbul akibat isolasi sosial. Dalam menghadapi hambatan ini, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, penyedia layanan pendidikan, dan komunitas pendidikan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Nasrulhaq et al. (2022b) kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan Merdeka Belajar di kalangan dosen, guru, dan siswa menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan secara efektif mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat penerapan kebijakan Merdeka Belajar secara optimal, karena para pelaku pendidikan tidak memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada dosen, guru, dan siswa untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan Merdeka Belajar. Dengan pemahaman yang baik, para pelaku pendidikan dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan ini, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ditawarkan oleh Merdeka Belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kemudian, dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia juga terdapat tantangan dan hambatan yang muncul dalam aspek infrastruktur pendidikan. Menurut Sadewo et al. (2022), salah satu aspek yang dapat menghadirkan kendala adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan atau yang dikenal dengan istilah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Wilayah-wilayah ini seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya guru yang berkualifikasi, serta keterbatasan teknologi dan akses internet. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Merdeka Belajar, terutama dalam menghadirkan inovasi pendidikan dan memastikan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah 3T, seperti peningkatan aksesibilitas, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik.

Bungawati (2022) juga mengungkapkan tantangan lain dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar yaitu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian siswa. Dalam penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), terdapat tantangan dalam mengubah pola pikir dan praktik guru yang sudah terbiasa dengan format RPP yang lebih kompleks. Guru perlu disertai dengan pendekatan yang tepat, pelatihan, dan dukungan yang memadai untuk dapat mengadaptasi dan menerapkan RPP yang lebih sederhana dan fleksibel. Selain itu, penghapusan Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar juga menghadapi tantangan. Meskipun penghapusan UN diharapkan dapat mengurangi tekanan pada siswa dan memfokuskan pada proses pembelajaran, implementasi yang efektif memerlukan upaya dalam membangun sistem penilaian alternatif yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan.

Kemudian, dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Fembriani (2022) juga menemukan tantangan dan hambatan yaitu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah, terutama dalam hal memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah. Penyediaan pelatihan yang memadai dan relevan menjadi penting untuk mengembangkan kompetensi pedagogis, kepemimpinan, dan keterampilan profesional guru serta kepala sekolah. Namun, terdapat kendala dalam hal anggaran, aksesibilitas, dan kesenjangan kualitas pelatihan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, hambatan lainnya meliputi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya akses teknologi informasi dan komunikasi, serta tantangan dalam mengubah budaya sekolah yang masih terpaku pada paradigma pembelajaran konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, kerjasama dengan berbagai pihak terkait, serta pengembangan kebijakan yang holistik dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM di sekolah melalui pelatihan yang berkualitas, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

#### 4. Dampak dan Hasil Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar adalah upaya yang memiliki dampak dan hasil signifikan dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan relevan, mengembangkan kompetensi dan karakter siswa, mengurangi beban administratif guru, serta meningkatnya keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan demikian, implementasi kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia.

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dampak dan hasil yang signifikan dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam dunia pendidikan Sibagariang et al. (2021). Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi guru dan siswa untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan relevan. Dengan adanya kebebasan dalam menentukan tujuan pembelajaran dan metode pengajaran, guru dapat lebih fokus pada materi esensial dan memilih pendekatan yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penggunaan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan interaktivitas dan aksesibilitas pembelajaran. Seiring dengan itu, terjadi peningkatan partisipasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, karena mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat belajar mereka dan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Hal ini secara keseluruhan meningkatkan mutu pembelajaran dan membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar-mengajar. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembelajaran merupakan hasil yang positif dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa (Mansyur, 2020). Dalam implementasinya, kebijakan ini memberikan perhatian yang lebih besar pada pembentukan kompetensi dan karakter yang baik pada siswa. Pengembangan kompetensi siswa meliputi pengembangan keterampilan akademik, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa didorong untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal dan menguasai keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa, seperti etika, moral, kepemimpinan, kewarganegaraan, dan nilai-nilai sosial. Dengan memberikan pengalaman lapangan dan mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata, siswa dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, ketekunan, dan empati. Dengan mengembangkan kompetensi dan karakter siswa secara holistik, kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Dampak dan hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang signifikan adalah pengurangan beban administratif yang dirasakan oleh guru Simanjuntak et al. (2023). Dalam konteks kebijakan ini, guru diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan dan metode pembelajaran, serta mendesain aktivitas yang relevan dan inovatif bagi siswa. Hal ini mengurangi beban administratif guru yang sebelumnya terkait dengan tuntutan administrasi yang kompleks dan waktu yang dihabiskan untuk memenuhi persyaratan administratif yang sering kali membatasi waktu dan energi yang dapat mereka dedikasikan untuk proses pembelajaran. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, guru dapat lebih fokus pada perencanaan, pengajaran, dan pembimbingan siswa, sehingga meningkatkan kualitas pengajaran dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengurangan beban administratif guru juga berdampak pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja guru, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dampak dan hasil implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dapat diamati melalui meningkatnya keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Melalui kebijakan ini, siswa diberikan kebebasan untuk mengikuti minat belajar mereka dan memiliki peran aktif dalam menentukan jalur pendidikan yang sesuai. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat secara

aktif dalam proses belajar-mengajar. Mereka merasa lebih bersemangat dalam menghadiri kelas, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengemukakan pendapat mereka. Keterlibatan siswa yang meningkat ini berdampak positif pada pembelajaran, karena mereka lebih terfokus, berani mengambil risiko dalam eksplorasi ide, dan berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selain itu, dengan merasa dihargai dan diberdayakan dalam proses pembelajaran, siswa juga mengembangkan sikap positif terhadap pendidikan dan meningkatkan motivasi mereka untuk meraih prestasi yang lebih baik.

## Pembahasan

Konsep Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Program ini terdiri dari beberapa kebijakan utama yang dirancang untuk mengubah dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Salah satu kebijakan utama dalam program Merdeka Belajar adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digantikan dengan Asesmen Nasional (AN), yang mencakup penilaian komprehensif terhadap kompetensi siswa. Selain itu, program ini juga menyederhanakan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam merencanakan pembelajaran yang bermutu. Implementasi sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PSB) juga menjadi bagian dari program ini untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah berkualitas dan sekolah yang kurang berkualitas. Dengan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan. Melalui program Merdeka Belajar, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam transformasi pendidikan di Indonesia, menuju sistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkualitas.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar memerlukan strategi yang efektif guna mewujudkan tujuan dan prinsip kebijakan tersebut. Salah satu strategi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan yang ditujukan kepada guru dan kepala sekolah. Dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan pedagogis para guru, mereka dapat memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Pelatihan dan pembinaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penguasaan materi pembelajaran, penerapan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, hingga peningkatan kemampuan dalam mendesain dan mengevaluasi kurikulum. Melalui peningkatan kualitas SDM di sekolah, diharapkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat meningkat.

Selain itu, strategi lain yang perlu diimplementasikan adalah penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Dengan adanya sistem zonasi, wilayah geografis dibagi menjadi zona-zona tertentu, dan siswa diberikan prioritas untuk masuk ke sekolah-sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki sekolah yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan rendah, diharapkan akses pendidikan yang adil dan merata dapat terwujud.

Selanjutnya, penyederhanaan format RPP dan penghapusan UN juga menjadi strategi yang penting. Dengan menyederhanakan format RPP, guru diberikan kebebasan untuk menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif, sehingga meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Penghapusan UN juga memiliki manfaat yang signifikan, karena menghilangkan tekanan dan beban yang biasanya dialami oleh siswa. Hal ini memungkinkan perhatian dapat difokuskan pada proses pembelajaran yang sebenarnya, sementara guru memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami materi dan menerapkan metode pengajaran yang lebih inovatif. Siswa juga dapat lebih fokus pada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan.

Selain itu, penerapan USBN yang diserahkan kepada sekolah juga merupakan strategi yang diperlukan. Dalam strategi ini, sekolah memiliki kewenangan dalam melaksanakan USBN sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa di lingkungan mereka. Hal ini memungkinkan penilaian terhadap kemampuan siswa menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi lokal. USBN yang dilakukan oleh sekolah juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka dengan lebih baik.

Strategi ini juga memberikan ruang bagi sekolah dalam merancang pendekatan penilaian yang lebih kontekstual dan mengakomodasi ke beragaman siswa.

Selanjutnya, peningkatan tata kelola keuangan dan administratif menjadi strategi yang tak kalah penting. Dengan meningkatkan tata kelola keuangan, alokasi dana pendidikan dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini akan mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan efektif. Sementara itu, peningkatan tata kelola administratif berkaitan dengan pembenahan proses dan sistem administrasi pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan data siswa, pengelolaan kepegawaian, serta prosedur pengadaan dan distribusi sumber daya pendidikan. Dengan tata kelola keuangan dan administratif yang baik, diharapkan program Merdeka Belajar dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Tidak kalah pentingnya adalah diseminasi kebijakan yang komprehensif kepada seluruh pihak, terutama dosen dan guru. Diseminasi kebijakan yang efektif dapat dilakukan melalui pertemuan, workshop, materi panduan, dan berbagai saluran komunikasi yang relevan. Dalam diseminasi, penting untuk menyoroti tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Dengan melakukan diseminasi yang baik, diharapkan para dosen dan guru dapat memahami dengan baik kebijakan ini dan berperan aktif dalam menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudian, dalam proses implementasi pasti terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia mencakup beberapa aspek yang perlu diatasi. Pertama, tantangan yang timbul akibat pandemi COVID-19, seperti adaptasi cepat dan efektif dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, kesenjangan akses teknologi dan internet, penyesuaian metode pembelajaran virtual, serta tantangan psikologis yang timbul akibat isolasi sosial. Kedua, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan Merdeka Belajar menjadi hambatan dalam implementasinya. Sosialisasi dan pelatihan intensif kepada dosen, guru, dan siswa penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini. Ketiga, tantangan dalam aspek infrastruktur pendidikan juga perlu diatasi, terutama di wilayah perbatasan atau 3T. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya guru berkualifikasi, serta keterbatasan teknologi dan akses internet menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Keempat, tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian siswa. Perubahan pola pikir dan praktik guru, pengembangan sistem penilaian alternatif setelah penghapusan Ujian Nasional, serta pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang lebih sederhana dan fleksibel merupakan tantangan yang harus diatasi. Kelima, tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM di sekolah melalui pelatihan dan pembinaan guru dan kepala sekolah. Kendala anggaran, aksesibilitas, kesenjangan kualitas pelatihan, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai menjadi hambatan dalam upaya ini. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dan pengembangan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar membutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan solusi dalam hal adaptasi teknologi, sosialisasi dan pelatihan, infrastruktur pendidikan, penilaian siswa, dan pengembangan SDM di sekolah. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain tantangan yang dihadapi, terdapat dampak dan hasil yang tampak dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia telah menunjukkan dampak dan hasil yang signifikan dalam dunia pendidikan. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa, kebijakan ini memungkinkan pengembangan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan relevan. Guru dapat memilih metode pengajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa, sementara siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat belajar mereka. Hal ini secara keseluruhan meningkatkan mutu pembelajaran dan membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar-mengajar.

Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar juga memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Pengembangan kompetensi siswa meliputi keterampilan akademik, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Guru didorong untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan menguasai keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa, seperti etika, moral, kepemimpinan, dan nilai-nilai sosial. Dengan mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata, siswa dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar juga berdampak pada pengurangan beban administratif guru. Dalam kebijakan ini, guru diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan dan metode pembelajaran, mengurangi beban administratif yang sebelumnya terkait dengan tuntutan administrasi yang kompleks. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada perencanaan, pengajaran, dan pembimbingan siswa, sehingga meningkatkan kualitas pengajaran dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kebebasan dalam menentukan jalur pendidikan mereka sesuai dengan minat belajar, siswa merasa memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar-mengajar. Siswa menjadi lebih terfokus dan berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa, kebijakan ini memungkinkan pengembangan pembelajaran yang inovatif, pengembangan kompetensi dan karakter siswa, pengurangan beban administratif guru, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat terus bertransformasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan generasi muda dan kemajuan negara.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia memerlukan strategi yang efektif, seperti peningkatan kualitas SDM, penerapan sistem zonasi, penyederhanaan format RPP dan penghapusan UN, penerapan USBN yang diserahkan kepada sekolah, peningkatan tata kelola keuangan dan administratif, serta diseminasi kebijakan yang komprehensif. Tantangan yang dihadapi termasuk adaptasi selama pandemi COVID-19, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, pemahaman tentang kebijakan yang masih kurang, dan peningkatan kualitas pembelajaran dan SDM. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi dan karakter siswa, pengurangan beban administratif guru, serta peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kebijakan Merdeka Belajar terus memperbaiki sistem pendidikan dan mendorong pertumbuhan generasi muda yang berkualitas.

Penelitian ini memiliki implikasi penting terkait kebijakan Merdeka Belajar dalam transformasi pendidikan di Indonesia yang menekankan pembelajaran mandiri dan pendidikan karakter. Meskipun kebijakan ini menghadapi tantangan komunikasi dan masalah sumber daya, namun kebijakan tersebut juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi muda yang kuat dan tangguh. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi dan alokasi sumber daya yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan kebijakan ini dapat berhasil mewujudkan tujuan transformasi pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian ini, saran-saran untuk penelitian selanjutnya terkait kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia adalah mengidentifikasi strategi efektif dalam mengatasi tantangan komunikasi dan sumber daya, melibatkan studi kasus pada berbagai tingkat pendidikan, melibatkan partisipasi semua pemangku

kepentingan, fokus pada evaluasi jangka panjang terhadap dampak kebijakan, dan memperkuat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi kebijakan ini dan potensi dampaknya dalam transformasi pendidikan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Madani, F., Ishaq, M. I., Purwito, L., & Sari, R. P. (2022). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*.
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anjelina, W., Silvia, N., & Gitituati, N. (2021). Program merdeka belajar, gebrakan baru kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1977–1982.
- Astini, N. K. S. (2022). Tantangan implementasi merdeka belajar pada era new normal covid-19 dan era society 5.0. *Lampubhyang*, 13(1), 164–180.
- Aziz, F. Z., Setiawan, F., Hariadi, D., & Setianingsih, F. N. (2022). Transformasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sebagai Landasan Pengelolaan Pendidikan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 217–228.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Bungawati, B. (2022). Peluang dan Tantangan Kurikulum Merdeka Belajar Menuju Era Society 5.0. *JURNAL PENDIDIKAN*.
- Daga, A. T. (2021). Makna merdeka belajar dan penguatan peran guru di sekolah dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 7(3), 1075–1090.
- Fembriani, F. (2022). Analisis Implementasi Pembelajaran IPA dan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*.
- Hamdani, M. H., & Zulfaqor, M. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Al - Ikhlah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak covid-19 terhadap dinamika pembelajaran di indonesia. *Education and learning journal*, 1(2), 113–123.
- Matondang, A. R., Nasution, F. S., & Setiawati, N. A. (2022). Asesmen Kompetensi Minimum Merdeka Belajar ditinjau dari Perspektif Guru Sekolah Dasar. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1), 159–165.
- Mauizdati, N. (2020). Kebijakan merdeka belajar dalam perspektif sekolahnya manusia dari Munif Chatib. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 3(2), 315–321.
- Merentek, T. C., Lantang, D., Rotty, V. N. J., & Lumapow, H. R. (2023). *Kebijakan Pendidikan*. UKIT Press.
- Merentek, T. C., Sumual, T. E., Usuh, E. J., & Kampilong, J. K. (2023). Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Masa Depan. *EL-IDARE: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 40–46. <https://doi.org/10.19109/ELIDARE.V9I1.16516>
- Nasrulhaq, N., Harakan, A., Syukri, S., Arfah, S. R., Khaerah, N., Tahir, N., & Wahid, N. (2022a). Diseminasi Kebijakan Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Makassar Indonesia. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*.

- Nasrulhaq, N., Harakan, A., Syukri, S., Arfah, S. R., Khaerah, N., Tahir, N., & Wahid, N. (2022b). Diseminasi Kebijakan Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Makassar Indonesia. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Pinatih, N. P. S. (2021). *Implementasi “Merdeka Belajar” pada Pendidikan Agama Hindu di SD Masa Pandemi*.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319.
- Sadewo, Y. D., Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2022). Persepsi, Kebutuhan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Perbatasan. *Sebatik*.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99.
- Simanjuntak, R., Elfrianto, E., Yusmidani, Y., & Saragih, V. (2023). Administrasi Tata Kelola dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2613–2619.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tohir, M. (2019). *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*.
- Widyastuti, A. (2022). *Merdeka Belajar dan Implementasinya: Merdeka GuruSiswa, Merdeka DosenMahasiswa, Semua Babagia*. Elex Media Komputindo.